Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur

Safuridar
Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra
e-mail: *safuridar@unsam.ac.id*

Novera Dwi Suci
Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra
e-mail: *noverads@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Pada desa perkebunan julok utara kecamatan indra makmu kabupaten aceh timur untuk tahun 2016 yang berjumlah 215 keluarga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah 8 kriteria kemiskinan menurut BPS dan Dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara termasuk dalam kategori miskin. Sarana dan prasarana yang ada pada Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya seperti fasilitas air bersih, sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti SMA dan SMP di desa tersebut hanya terdapat masing-masing 1 (satu) unit serta sarana di bidang kesehatan. jumlah penduduk miskin untuk tahun 2010 adalah sebesar 197 jiwa, tahun 2011 adalah sebesar 194 jiwa, tahun 2012 sebesar 200 jiwa, tahun 2013 adalah sebesar 203 jiwa, tahun 2014 adalah sebesar 205 jiwa, tahun 2015 adalah sebesar 209 jiwa dan tahun 2016 adalah sebesar 215 jiwa.

Kata Kunci: *Program Kemiskinan, kehidupan masyarakat miskin.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang paling fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak yang ada dinegeri ini tidak dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, kesulitan kesehatan, kurangnya tabungan sehingga menimbulkan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat rela melakukan apa saja dalam mempertahankan hidupnya. Kemiskinan juga menganggu stabilitas

ekonomi, untuk itu permasalahan kemiskinan harus diselesaikan bersama baik di tingkat pemerintahan pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dibutuhkannya peran aktif pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah berperan sebagai alokasi, distribusi dan stabilitas. Peran pemerintah tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan merupakan tolak ukur dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa permsalahan pembangunan lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan ide, strategi, kebijakan dan program dalam penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan yaitu melalui transmigrasi. Program ini disamping untuk pemerataan penduduk tetapi juga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah dengan pemberian harapan baru dalam upaya peningkatan pendapatan.

Pada masa orde lama, orde baru sampai dengan sekarang ini pemerintah telah meluncurkan berbagai peraturan dan juga instruksi presiden dalam rangka penanggulangan kemiskinan, diantarannya inpres kesehatan, inpres pendidikan, inpres pasar dan inpres desa tertinggal (IDT), namun masih banyak program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang sekarang dikenal PN-PM Mandiri, kredit usaha keluarga sejahtera, program pembangunan pendukung desa tertinggal (P3DT), program pengembangan kecamatan (PPK), program pengembangan gampong (PPG), Program Keluarga Harapan (PKH), Askeskin, Raskin, Dana BOS, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Demi menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi saat ini, hendaknya pemerintah perlu menyalurkan beberapa jenis program bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden nomor Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan. Perpres ini berguna untuk mempercepat program 3 kartu dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam perpres disebutkan bahwa, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pemerintah menetapkan program perlindungan sosial, yakni Program simpanan keluarga sejahtera, Program Indonesia pintar dan Program Indonesia sehat.

Kabupaten ceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada disisi timur Provinsi Aceh. Kota Idi Rayeuk merupakan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini terletak antara kabupaten Aceh Utara dan Kota Langsa. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten yang kaya akan hasil minyaknya selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Dengan luas mencapai 6,040,60 Km, Kabupaten ini terdiri dari 24 kecamatan dan 515 jumlah desa, 59 Mukim yang terdiri dari 1606 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 423.820 ribu jiwa. Rata-rata penduduk memliki mata pencaharian sebagai petani (Sumber : BPS Kabupaten Aceh Timur).

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak daerah, terutama daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan pemerintah. Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. Munculnya permasalahan kemiskinan di desa tersebut dikarenakan terjadinya ketimpangan sosial, terbatasnya akses kesehatan, pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Untuk menekankan laju jumlah penduduk miskin di desa tersebut hendaknya diperlukan keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menanggulanginya.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup rumit, dan penanggulangan kemiskinan harus terus menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dalam menghadapi kemiskinan didesa tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah

banyak melakukan upaya langkah-langkah yang sistematis. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada desa tersebut adalah dengan meningkatkan akses sarana dan prasarana fasilitas umum. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik memilih judul "Analisis Dampak bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur".

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur.

Pengertian Kemiskinan

Menurut *World Bank* dalam Bappeda (2013) mendefenisikan kemiskinan yaitu terkait dengan keadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat kedokter, tidak mampu sekolah serta tidak dapat membaca dan menulis. Disamping itu juga tidak memiliki pekerjaan, tidak ada akses untuk mendapatkan air bersih dan ketidakberdayaan.

Pengertian kemiskinan di Indonesia sendiri berbeda antar lembaga yang melakukan analisis tentang kemiskinan, Bappeda (2013), menyimpulkan bahwa beberapa defenisi kemiskinan dari lembaga yang melakukan analisis tentang pengertian kemiskinan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, dan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar tersebut antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan untuk pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial – politik.
3. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan meliputi keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan minimal 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian keluarga miskin ini didefinisikan lebih lanjut menjadi: 1) paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur, 2) setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, 3) luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni dan keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan salah satu atau lebih indikator, yang meliputi: 1) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, 2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,

bekerja/sekolah dan bepergian, 3) bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

Ukuran Kemiskinan

Menurut Rahardjo (2005), secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu "kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif".

1. Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai pembelian kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Hal ini maksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. kemiskinan relatif, yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun tidak selalu berarti tidak miskin. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan yang bersangkutan.

Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut Nurhadi (2007), membagi kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda, yaitu: kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik.

1. Kemiskinan Ekonomi
   Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah financial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.
2. Kemiskinan Sosial
   Secara sosial, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.
3. Kemiskinan Politik
   Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan *resources*.

Penyebab Kemiskinan

Seseorang atau penduduk menjadi miskin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti karena mengalami cacat baik fisik maupun mental, berpendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau juga karena hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam yang minim dan infrastruktur yang terbatas. (Suharto, 2009)

Kemiskinan juga disebabkan oleh lemahnya indicator keluarga seperti rata-rata kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi, angka pengangguran yang meningkat, tingkat pendapatan rendah, status gizi rendah, status perumahan atau tempat tinggal yang kumuh, tingkat pendidikan rendah, pengeluaran untuk konsumsi pangan tidak mencukupi dan sebagainya. Disamping itu, kondisi pemukiman, transportasi, sarana air bersih, fasilitas jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya juga tidak mencukupi. (Supriatna, 2005)

Kriteria Kemiskinan

Menurut BPS, terdapat 8 kriteria penduduk miskin yaitu:

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 m^2 per anggota rumah tangga
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya
3. Fasilitas air bersih tidak ada
4. Fasilitas jamban atau WC tidak ada
5. Kepemilikan aset tidak tersedia
6. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi
7. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun tidak ada
8. Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000.

Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Menurut Nurkse dalam Saragih (2006), ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu :

1. Dari segi penawaran (*supply*), tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan kekurangan modal dan demikian produktivitasnya rendah.
2. Dari segi permintaan (*Demand*). Di Negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah, tingkat produktivitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan model yang terbatas dimasa lalu.

Indikator Kemiskinan

Standar hidup merupakan kondisi dan tingkat minimal pemenuhan kebutuhan manusia agar dapat hidup secara layak sebagai mahluk yang memiliki harkat dan martabat. Artinya untuk dapat hidup secara layak maka manusia dihadapkan kepada kebutuhan minimum yang harus dipenuhi, dengan kata lain jika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum tersebut maka mereka dikategorikan sebagai masyarakat ataupun penduduk yang miskin. Sebaliknya jika seseorang atau sekelompok orang tersebut mampu memenuhi kebutuhan minimum, akan dikategorikan sebagai yang tidak miskin. (Siagian, 2012).

Faktor Penyebab Kemiskinan

Secara konseptual, Suharto (2009) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

1. Faktor individual.
   Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dari psikologis si miskin. Masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Faktor sosial.
   Kondisi – kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
2. Faktor Kultural.
   Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
3. Faktor Struktur.
   Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Strategi atau Kebijakan dalam Mengurangi Kemiskinan

Menurut Arsyad (2006), ada beberapa strategi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Pertanian
   Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi dari pengurangan

kemiskinan di Indonesia. Aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama dipedesaaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan perdesaan dan pengurangan kemiskinan perdesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi. Kontribusi lainnya adalah dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras. Misalnya petani di luar Jawa dibantu untuk menanam karet, kelapa dan sawit.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut.
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
   LSM memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang dibina. LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif ketimbang program-program pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 klaster yaitu:

1. Klaster I merupakan program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang terdiri dari program jamkesmas, program keluarga harapan, program bantuan langsung tunai, program beras untuk keluarga miskin (raskin) dan program bantuan siswa miskin (BSM).
2. Klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
3. Klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang terdiri dari program kredit usaha rakyat (KUR).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode analisis data yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Adapun jenis-jenis analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : .

1. Kriteria kemiskinan menurut BPS.
2. Dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan.
3. *Expost Facto* merupakan penelitian dimana variabel-variabel telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terkait dalam suatu

HASIL ANALISIS

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara. Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Indra Makmu. Kondisi Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara pada umunya sama dengan dengan desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Indra Makmu yaitu termasuk desa dengan kategori tertinggal. Hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk pada desa tersebut yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara beragama islam. Untuk mencapai desa tersebut kita dapat

menggunakan akses transportasi darat. Desa ini mempunyai luas wilayah sebesar 4.668 Ha = 46.680 KM^2. Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Berdiri pada tanggal 23 Maret Tahun 2006. Hasil Pemekaran dari Desa Alue Ie Itam Awalnya Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara hanya sebagai Desa Persiapan, tepat pada Tanggal 5 Mei 2008 Desa Persiapan Perkebunan Julok Rayeuk Utara disahkan sebagai Desa Defenitif.

Batas-batas wilayah Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, sebelah utara berbatasan dengan Desa Alue Ie Mirah, sebelah selatan dengan gampong Julok Rayeuk Selatan, Sebelah Timur dengan Desa Pelita Sagoup Jaya, Gampong Seuneubok Cina serta Gampong Alue Ie Itam dan sebelah barat dengan Desa Seunebok Bayu. Jumlah penduduk miskin di Desa ini mencapai 215 Jiwa. Pada kenyataannya, masyarakat Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara tergolong memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Setiap tahunnya jumlah penduduk miskin per KK mengalami peningkatan. Kondisi kemiskinan yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara pada umumnya disebabkan oleh karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Analisis Dampak Bantuan Program Penangulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan kebutuhan penelitian, untuk lebih sistematis dalam menganalisis dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat miskin berikut ini diuraikan beberapa metode analisis yang dipergunakan yaitu sebagai berikut :

1. Kriteria kemiskinan menurut BPS

Selama penelitian berlangsung penulis menemukan beberapa Kriteria kemiskinan yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, sesuai dengan 8 kriteria kemiskinan yang diajukan oleh BPS, adapun kriteria tersebut yaitu : Luas lantai hunian kurang dari 8 m^2 per anggota rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara masih terdapat rumah penduduk yang luasnya mencapai 6 m^2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya dari tanah dan semen.

a. Fasilitas air bersih tidak ada

Fasilitas air bersih adalah alat penunjang kebersihan suatu proses upaya pengadaan air bersih yang dilakukan didalam pelayanan publik. Di desa ini hanya ada satu unit fasilitas air bersih. Fasilitas air bersih tersebut berada di dusun simpang tiga. Untuk lebih jelasnya mengenai penyediaan fasilitas air bersih didesa tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.

b. Fasilitas jamban atau WC tidak ada

Jamban atau WC merupakan fasilitas atau sarana pembuangan kotoran manusia. Untuk fasilitas jamban atau WC hampir seluruh rumah warga yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara tidak memiliki fasilitas jamban atau WC. Namun di Desa tersebut terdapat 4 (empat) unit fasilitas WC umum.

c. Kepemilikan aset tidak tersedia

Terkait dengan kepemilikan asset berdasarkan observasi dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, rata-rata mempunyai kepemilikan aset yang dapat dijual seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, sawah dan asset berharga lainnya.

d. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga setempat dapat diketahui bahwa penduduk setempat mengkonsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi, jikalau harga ikan sedang murah mereka mengkonsumsi ikan tetapi ketika harga ikan mahal mereka menggantinya dengan mengkonsumsi telur.

e. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun tidak ada

Pakaian merupakan sebuah kebutuhan yang wajib harus dipenushi oleh setiap manusia. Untuk itu setiap individu manusia harus selalu bekerja keras dalam memenuhi semua kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan

warga desa setempat, penulis menyimpulkan bahwa penduduk desa tersebut masih mampu membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun yaitu ketika menghadapi hari raya idul fitri.

f. Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga desa tersebut dapat di ketahui bahwa masih banyak warga pada Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan

Sebagaimana diketahui bantuan program penanggulangan kemiskinan mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, berikut ini diuraikan dampak penanggulangan kemiskinan:

1. Dampak positif

Berdasarkan selama berlangsungnya penelitian ini, berikut penulis menyimpulkan beberapa point berkaitan dengan dampak positif yang timbul dari bantuan program penanggulangan kemiskinan.

a. Dapat menekan beban pengeluaran masyarakat miskin
b. Dapat mencukupi kebutuhan masyarakat miskin dalam waktu singkat Dapat memperluas kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan perluasan kesempatan dalam berusaha
c. Dapat menangani permasalahan kurang gizi dan kurang pangan
d. Dapat meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya kesempatan masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

2. Dampak negatif

Berdasarkan penelitian, berikut ini penulis menyimpulkan beberapa point berkaitan dengan dampak negatif yang timbul dari bantuan program penanggulangan kemiskinan.

a. Dapat menimbulkannya rasa kecemburuan sosial antar masyarakat miskin dengan yang tidak mendapat bantuan
b. Dapat menjadikan masyarakat selalu berangan-angan dengan adanya bantuan program penanggulangan kemiskinan
c. Tidak bersifat mendidik
d. Dapat menurunkan semangat dalam bekerja karena selalu akan mendapat bantuan lagi
e. Banyak penduduk yang mendapatkan bantuan program penanggulangan kemiskinan menggunakan bantuan tersebut sebagai konsumsi bukan untuk investasi. Hal ini sering terjadi pada program bantuan KUR (kredit usaha rakyat).

3. Dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara.

Program penanggulangan kemiskinan membawa dampak bagi seluruh sektor kehidupan termasuk juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan maksud tersebut berikut ini penulis menguraikan dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara.

a. Kehidupan Sosial

1. Asset

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa masyarakat Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara rata-rata memiliki asset berharga yang dapat dijual seperti sepeda motor, tanah, sawah dan asset berharga lainnya. Sehubungan dengan asset, program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada desa tersebut tidak membawa dampak apapun. Namun untuk program penanggulangan kemiskinan di tahun 2016 untuk desa tersebut, telah diberikannya 15 ekor kambing kepada keluarga miskin di desa itu. Jadi dengan kata lain dengan adanya

program tersebut secara tidak langsung telah terjadinya penambahan asset berharga bagi kehidupan sosial mereka.

2. Rumah

Kondisi rumah warga yang ada di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara yang sangat memprihatinkan. Sebagaimana diketahui untuk wilayah Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan rumah warga miskin, salah satu program tersebut adalah pembangunan rumah untuk kaum dhuafa setiap tahunnya. Untuk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara program ini berdampak pada dibangunnya beberapa rumah penduduk yang kurang mampu, akan tetapi program pembangunan rumah kaum dhuafa belum mampu menjangkau atau menyentuh seluruh rumah warga miskin yang ada di desa itu. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, dana dan luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

3. Pendidikan

Salah satu program pemerintah untuk pendidikan saat ini adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Di desa ini program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah berjalan dimana terdapat 73 KK yang memperoleh program tersebut. Sama halnya dengan desa lain, pada Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara program ini berdampak pada terbantunya anak-anak di desa tersebut dalam memperoleh layanan mutu pendidikan yang baik. Akan tetapi dengan berjalannya program tersebut, ternyata di desa tersebut masih terdapat anak-anak yang putus sekolah.

4. Kesehatan

Program pemerintah untuk bidang kesehatan saat ini adalah Kartu Indonesia Sehat. Tujuan dari program ini adalah agar seluruh warga maupun masyarakat miskin yang ada di seluruh penjuru Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik. Sama dengan desa lain pada umumnya, untuk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara program ini berdampak pada terwujudnya pelayanan kesehatan bagi para warga-warga miskin, meskipun sarana dan prasarana yang ada di desa itu sangat minim sekali.

b. Kondisi Ekonomi

1. Pendapatan

Bagi sektor pendapatan, dengan adanya program penaggulangan kemiskinan di Desa Perkebunan Julok Rayeuk sudah pasti akan meningkatkan sisi pendapatan masyarakat miskin itu sendiri. Seperti program kartu keluarga sejahtera, dimana bagi masyarakat miskin memperoleh bantuan tunai sebesar Rp 200.000 yang diberikan oleh pemerintah. Namun seiring dengan semakin bertambah mahalnya kebutuhan hidup, masyarakat miskin di desa tersebut harus bekerja lebih keras lagi dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Konsumsi

Untuk masalah konsumsi, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program penanggulangan kemiskinan tidak berdampak apapun terhadap pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi lauk pauk ikan dan menggantinya dengan telur jika harga ikan terlalu mahal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara termasuk dalam kategori miskin.
2. Berdasarkan sarana dan prasarana yang pada Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya seperti fasilitas air bersih, sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti SMA dan SMP di desa tersebut hanya terdapat masing-masing 1 (satu) unit serta sarana di bidang kesehatan.

SARAN

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Aceh Timur diharapkan agar lebih memberikan perhatian lagi terhadap kehidupan masyarakat miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara dengan melakukan berbagai cara dan langkah dalam memajukan desa tersebut.
2. Agar pemberian bantuan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, perlu adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola dan pelaksanaan pemberian bantuan program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur pada umumnya dan Desa Perkebunan Julok Ryeuk Utara khususnya.
3. Bagi PT Perkebunan Nusantara I selayaknya dapat memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Agar masyarakat miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih desa lainnya yang ada di wilayah Aceh Timur, yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, karena hal tersebut dapat menjadi sebuah perbandingan dan juga sebagai pelengkap dari penelitian ini. Sehingga penelitian lanjutan tersebut dapat memberikan gambaran yang rinci lagi mengenai analisis dampak bantuan program penanggulangan terhadap kehidupan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Arraiyah, M. Hamdar. 2007. **Meneropong Fenomena Kemiskinan**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arsyad, Lincoln. 2006. Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Yogyakarta: BP STIE YKPN.

Bappeda. 2013. **Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan**, Medan: Bappeda Medan.

http: www.Sukrisnaaji.blogspot.com diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

http://*www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview*. diakses pada tanggal 19 januari 2017.

Ningsih, Mega Puspita. 2012. Analisis Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, **Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan**, Vol 4 No.1 Hal 133-140.

Gunamantha, I made dan Susila, Gede Putu Agus Jana. 2015. Analisis dampak program pengembangan kecamatan terhadap pengentasan kemiskinan Di kabupaten buleleng, **Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora**, Vol 4 No.1 Hal 523-533.

Nurhadi. 2007. **Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan Kemiskinan**, cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.

Rahardjo. 2005. **Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah**, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Salim, Emil. 2006. **Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan.** Jakarta: Idayu.

Saragih, Togar. 2006. **Pengangguran, Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia**, Jurnal Teleskop Volume 5 Edisi 9, Bandung: STIE. Y. A. I.

Siagian, Matias. 2012. **Kemiskinan dan Solusi**, Cetakan Pertama, Medan: Grasindo Monoratama.

Suharto, Edi. 2009. **Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia**, Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, Tjahya. 2005. **Strategi Pembangunan dan Kemiskinan**,

Cetakan Pertama. Jakarta: Rhineka Cipta.

Panjaya, Yossy Herma. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus : Di Kelurahan Pedurungan Kidul)

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang **percepatan penanggulangan kemiskinan**,

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 **tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan.**